



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 82 TAHUN 2014

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN  
INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 pada tanggal 30 Januari 2014, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dan Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92 );
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80 );
  11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5);
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 79 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;

22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 23 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 23);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2013-2018.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018.
6. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2018.

7. Kinerja Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran Pemerintah Provinsi sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
8. Kinerja SKPD adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran SKPD sebagai penjabaran dari visi dan misi yang tertuang dalam Renstra SKPD Tahun 2013-2018, yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan.
9. Pengukuran Kinerja adalah kegiatan manajemen khususnya membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
10. Pemantauan Kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja, dan identifikasi, analisis sertaantisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
11. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
12. IKU pemerintah provinsi adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis pemerintah provinsi, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.
13. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis SKPD, sebagaimana tertuang dalam Renstra SKPD Tahun 2013-2018.
14. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
15. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN dan atau APBD.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
18. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada tujuan dan sasaran strategis organisasi.
19. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada setiap program dan kegiatan.

20. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Badan Pusat Statistik pada tingkat Provinsi Jawa Tengah.

## BAB II

### TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Tujuan penetapan IKU meliputi:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik ; dan
- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Provinsi dan SKPD yang selanjutnya digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

#### Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup IKU terdiri dari :
  - a. IKU Pemerintah Provinsi; dan
  - b. IKU SKPD.
- (2) IKU Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) IKU SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## BAB III

### PEMILIHAN DAN PENGEMBANGAN PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### Pasal 4

- (1) IKU Pemerintah Provinsi dengan IKU SKPD harus selaras dan sinkron.
- (2) IKU untuk setiap tingkatan organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. IKU Pemerintah Provinsi sekurang-kurangnya merupakan indikator hasil (*outcome*) ; dan
  - b. IKU SKPD sekurang-kurangnya merupakan indikator keluaran (*output*).

#### Pasal 5

Pemilihan dan penetapan IKU mempertimbangkan:

- a. dokumen RPJMD dan atau Renstra SKPD, kebijakan umum dan atau dokumen strategis lainnya yang relevan;
- b. bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta fungsi peran lainnya;
- c. kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- d. kebutuhan data statistik pemerintah; dan

- e. kelaziman pada bidang tertentu dan perkembangan ilmu pengetahuan.

#### BAB IV PENGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

##### Pasal 6

IKU digunakan untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penganggaran;
- d. menyusun dokumen penetapan kinerja;
- e. pelaporan akuntabilitas kinerja;
- f. evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- g. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

##### Pasal 7

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Provinsi dan SKPD sebagaimana termuat dalam dokumen RPJMD dan Renstra SKPD harus dinyatakan dengan indikator kinerja utama.

##### Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi dan SKPD perlu melaksanakan analisis dan evaluasi kinerja dengan memperhatikan capaian IKU untuk melengkapi informasi yang dihasilkan dalam pengukuran kinerja dan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Analisis dan evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan singkat dengan meneliti fakta-fakta yang ada baik berupa kendala, hambatan maupun informasi lainnya.

#### BAB V PEMBINAAN, KOORDINASI, MONITORING, EVALUASI DAN PENGAWASAN

##### Pasal 9

- (1) Pembinaan dan pengembangan atas pelaksanaan IKU dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan akuntabilitas kinerja.
- (2) Koordinasi untuk pengintegrasian IKU kedalam sistem perencanaan, penganggaran, monitoring dan evaluasi capaian program, serta pelaporan pertanggungjawaban program dan kegiatan dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan.
- (3) Pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dilaksanakan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 068.2/54/2009 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 060/32/2011 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 30 Desember 2014

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 84



LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
 NOMOR 82 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH  
 PROVINSI JAWA TENGAH DAN INDIKATOR  
 KINERJA UTAMA SATUAN KERJA PERANGKAT  
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 TAHUN 2013-2018

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
 TAHUN 2013 - 2018**

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.	Memberikan haluan pada 6 (enam) misi lain dalam pengamalan ajaran Tri Sakti Bung Karno		
1.1.1	Meningkatnya demokrasi, kesejahteraan dan nilai-nilai budaya berbasis ajaran Tri Sakti Bung Karno	1) Persentase capaian sasaran pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan di Jawa Tengah sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatan demokratisasi, kesejahteraan dan nilai-nilai budaya berbasis ajaran Tri Sakti Bung Karno.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math>\frac{\text{Realisasi Sasaran Pembangunan}}{\text{Target Sasaran Pembangunan}} \times 100 \%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		2) Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pertumbuhan PDRB di Jawa Tengah, mengingat PDRB sebagai salah satu indikator ekonomi memuat berbagai instrumen ekonomi yang didalamnya terlihat dengan jelas keadaan makro ekonomi suatu daerah dengan pertumbuhan ekonominya, pendapatan perkapita dan berbagai instrumen lainnya, dengan adanya data-data tersebut akan sangat membantu pengambil kebijakan dalam</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>perencanaan dan evaluasi sehingga pembangunan tidak akan salah arah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">= \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\%</math> </li> </ul> <p>Keterangan :  PDB/PDRB<sub>t</sub> : PDB/PDRB tahun tertentu  PDB/PDRB<sub>t-1</sub> : PDB/PDRB thn sebelumnya</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b>  Komulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b>  Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b>  BPS Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		3) Laju Inflasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>  Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kecenderungan meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Hal ini penting dikendalikan agar tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\Delta \text{Inf} = \frac{\text{Inf}_{(n+1)} - \text{Inf}_{(n)}}{\text{Inf}_{(n)}} \times 100\%</math> </li> </ul> <p>Keterangan :  Inf<sub>n</sub> = nilai inflasi pada tahun n  Inf<sub>(n+1)</sub> = nilai pada 1 tahun berikutnya  n = tahun ...</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b>  Komulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b>  Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sumber Data :</b> BPS Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		4) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah program-program pembangunan yang dilaksanakan berpengaruh terhadap tingkat pendapatan masyarakat di Jawa Tengah, dengan adanya data tersebut akan sangat membantu pengambil kebijakan dalam perencanaan dan evaluasi sehingga pembangunan tidak akan salah arah.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">= \frac{\text{PDRB}}{\sum \text{penduduk}} \times 100 \%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> BPS Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		5) Indeks Gini	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengukur kesenjangan pendapatan antar kelompok miskin dan kelompok kaya. Hal ini penting mengingat kesenjangan pendapatan antara kelompok miskin dan kelompok kaya di Jawa Tengah masih cukup tinggi, sehingga perlu mendapatkan perhatian. Adanya data tersebut akan sangat membantu pengambil kebijakan dalam perencanaan dan evaluasi sehingga pembangunan akan lebih tepat sasaran .</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">G = 1 - \sum_{i=1}^k P_i (Q_i + Q_{i-1})</math> Pi : persentase rumah tangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>G &lt; 0,3</math> = ketimpangan rendah</li> <li>• <math>0,3 \leq G \leq 0,5</math> = ketimpangan sedang</li> <li>• <math>G &gt; 0,5</math> = ketimpangan tinggi</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipe Perhitungan:</b> Komulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data:</b> BPS Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		6) Indeks Pembangunan Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat keberhasilan pembangunan sumberdaya manusia, hal ini penting bagi perumus kebijakan dan para pengambil keputusan untuk menentukan langkah-langkah pembangunan yang perlu dilakukan di masa mendatang. IPM merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, Rata-rata Lama Sekolah dan Rata-rata Pendapatan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">IPM = 1/3 \sum \text{Indeks (i,j)}</math> Keterangan : Indeks X (i,J) = Indeks komponen IPM ke i untuk wil. Ke j <math>I = 1,2,3</math> <math>j = 1,2, \dots, k</math> wilayah</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Biro Bina Mental Setda Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> BPS Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.1.	<b>Menurunkan jumlah penduduk miskin</b>		
2.1.1	Menurunnya angka kemiskinan	Persentase penduduk miskin	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar pelaksanaan pembangunan memberikan pengaruh pada penurunan angka kemiskinan, mengingat salah satu prioritas pembangunan di Jawa Tengah diarahkan pada penurunan angka kemiskinan .</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">P_0 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[ \frac{z - y_i}{z} \right]^p</math> <p>P<sub>0</sub> : persentase penduduk miskin  z : Garis Kemiskinan  y<sub>i</sub> : Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (i = 1, 2, ..., q), y<sub>i</sub> &lt; z  q : Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan  n : Jumlah penduduk</p> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Biro Bina Sosial Setda Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> BPS Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
2.2	<b>Menurunkan jumlah penganggur</b>		
2.2.1	Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	1) Persentase Tingkat Pengangguran terbuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ditujukan untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pembangunan yang sedang dilaksanakan memberikan pengaruh pada penurunan pengangguran, mengingat pembangunan di Jawa Tengah prioritasnya diarahkan pada penurunan pengangguran dengan memperhatikan seberapa banyak jumlah penduduk yang memasuki usia kerja dan menjadi pencari kerja.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Komulatif</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> BPS Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>
		2) Persentase Partisipasi Angkatan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi prosentase partisipasi angkatan kerja dengan melihat perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Melalui indikator ini dapat untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan pemerintah dalam memberikan peluang kerja baik disektor formal dan non formal.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> BPS Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>
		3) Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak kesempatan kerja yang tersedia dibanding penduduk yang memasuki usia kerja di Jawa Tengah. Indikator ini dibutuhkan khususnya untuk dasar pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah kesempatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk usia kerja}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sumber Data :</b> BPS Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>
2.3	Mewujudkan Desa Mandiri/ Berdikari melalui kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi	Mandiri/ Berdikari	melalui kedaulatan Pangan dan
2.3.1	Terjaminnya kedaulatan pangan melalui (produksi dan cadangan pangan), keterjangkauan konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal	1). Ketersediaan Pangan Utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk memastikan seberapa banyak ketersediaan pangan utama (beras) di Jawa Tengah, hal ini penting dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kekurangan bahan pangan di daerah.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah ketersediaan pangan utama (beras) per Tahun dalam satuan (Ton)</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		2). Persentase penguatan cadangan pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini untuk memastikan tersedianya cadangan pangan ditingkat provinsi sebesar 200 ton ekuivalen beras.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Jml Cadangan Pangan Provinsi}}{200 \text{ Ton}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		3). Persentase ketersediaan informasi pasokan, harga,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk memastikan agar pemerintah daerah menyediakan informasi mengenai pasokan,</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
		dan akses pangan di daerah	<p>harga dan akses pangan, digunakan sebagai bahan untuk membuat analisis perumusan kebijakan yang terkait masalah distribusi pangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Rata-rata jumlah informasi pasokan, harga dan akses pangan yang direlease <math>\times 100\%</math> Rata-rata jumlah informasi pasokan, harga dan akses pangan yang seharusnya direlease</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		4).Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengetahui situasi pola konsumsi pangan masyarakat dari segi kuantitas maupun kualitasnya menuju pola pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan skor PPH</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Komposisi 9 kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		5).Jumlah produksi tanaman pangan,perkebunan dan peternakan :	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator dipilih sebagai bahan evaluasi capaian peningkatan produksi padi, mengingat padi merupakan sumber pangan utama masyarakat sehingga produktivitasnya perlu ditingkatkan dan dijaga agar tidak</li> </ul>



NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Padi</li> <li>- Jagung</li> <li>- Kedelai</li> <li>- Tebu</li> <li>- Kelapa</li> <li>- Daging</li> <li>- Susu</li> <li>- Telur</li> </ul>	<p>terjadi kerawanan pangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah produksi tanaman pangan, perkebunan dan peternakan pada tahun bersangkutan .</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		<p>6).Produksi perikanan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tangkap;</li> <li>- Budidaya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi program pengembangan perikanan tangkap terhadap jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya. Hal ini penting, mengingat Jawa Tengah memiliki wilayah laut dan potensi perikanan budidaya yang cukup luas, sehingga perlu dioptimalkan potensinya demi mendukung kesejahteraan masyarakat.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah produksi perikanan tangkap dan budidaya pada tahun berjalan.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah .</li> </ul>
		<p>7).Tingkat konsumsi ikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi jumlah konsumsi ikan di Jawa Tengah, mengingat tingkat konsumsi ikan di Jawa Tengah masih rendah, sehingga perlu ditingkatkan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b></li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p><b><u>(Produksi Perikanan + Impor) – Ekspor</u></b> <b>Jumlah Penduduk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		8). Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk memantau seberapa besar kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Jawa Tengah pada tahun bersangkutan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah kontribusi sektor pertanian}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Pertanian Tanaman Pangan Dan Holtikultura Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> BPS Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		9). Kontribusi Sektor Perkebunan terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk memantau seberapa besar kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB Jawa Tengah pada tahun bersangkutan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah kontribusi sub sektor perkebunan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> BPS Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
		10). Kontribusi Sektor Peternakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk memantau seberapa besar kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB Jawa Tengah pada tahun bersangkutan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah kontribusi sub sektor peternakan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> BPS Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
2.3.2	Terjaminnya ketersediaan energi dengan potensi lokal	1). Rasio Elektrifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk melakukan evaluasi seberapa banyak kepala keluarga yang sudah mendapatkan pelayanan elektrifikasi, mengingat belum seluruh kepala keluarga di Jawa Tengah telah mendapatkan pelayanan listrik.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah kepala keluarga berlistrik}}{\text{Jumlah total kepala keluarga}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		2). Persentase pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) terhadap total konsumsi energi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk melakukan evaluasi seberapa besar pemanfaatan EBT di masyarakat, hal ini penting untuk mendorong agar masyarakat tidak mengalami ketergantungan terhadap pemakaian energi fosil.</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
		3). Kontribusi sektor pertambangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah pemanfaatan EBT.}}{\text{Total konsumsi energi}} \times 100</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk memantau seberapa besar kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Jawa Tengah pada tahun bersangkutan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah kontribusi sektor pertambangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
<b>2.4</b>	<b>Mengembangkan Koperasi dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM)</b>		
2.4.1	Meningkatnya jumlah dan kualitas daya saing dan produktivitas Koperasi dan Usaha Menengah, Kecil dan Mikro (UMKM)	1). Jumlah produk/ komoditas <i>One Village One Production</i> (OVOP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi sejauhmana perkembangan produk OVOP di Jawa Tengah, hal ini penting guna mendorong terjadinya peningkatan produk UMKM .</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah Produk OVOP berbasis Koperasi di Jawa Tengah pada tahun bersangkutan.</li> <li>• <b>Tipe Penghitungan :</b> Kumulatif.</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		2).Persentase Koperasi Sehat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak koperasi sehat dibanding jumlah koperasi provinsi secara keseluruhan di Jawa Tengah.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah koperasi sehat}}{\text{Jumlah seluruh koperasi di Jawa Tengah}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		3).Persentase Koperasi Aktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa banyak koperasi aktif dibanding dengan jumlah koperasi secara keseluruhan di Jawa Tengah, mengingat tidak semua koperasi yang telah berijin aktif beroperasi sehingga perlu dilakukan evaluasi sebagai bahan pengambilan kebijakan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah koperasi aktif}}{\text{Jumlah seluruh koperasi di Jawa Tengah}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>
<b>2.5</b>	<b>Mengembangkan Kelembagaan Ekonomi Pedesaan</b>		
2.5.1	Meningkatnya kelembagaan	1).Jumlah Usaha Peningkatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk memantau</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
	ekonomi pedesaan	Pendapatan Keluarga (UP2K-PKK) yang aktif	<p>UP2K di Jawa Tengah yang telah terbentuk dan aktif.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah UP2K - PKK di Jawa Tengah yang aktif pada tahun bersangkutan.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		2).Jumlah Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP) yang aktif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi capaian kelembagaan UED-SP yang aktif, mengingat masih banyak UED-SP yang perlu ditingkatkan kinerjanya.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah UED-SP yang aktif dan diberi stimulan dalam tahun bersangkutan</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		3).Jumlah Desa Mandiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah desa mandiri yang menjadi <i>pilot projek</i> menuju desa berdikari.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Banyaknya jumlah desa yang mandiri pada tahun bersangkutan</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sumber Data :</b> Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
<b>2.6</b>	<b>Meningkatkan produk berkualitas ekspor dan penggunaan produk dalam negeri</b>		
2.6.1	Meningkatnya kualitas produk unggulan orientasi ekspor dan pengendalian impor non migas	1). Persentase pertumbuhan industri pengolahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk memantau seberapa banyak pertumbuhan industri pengolahan di Jawa Tengah, mengingat dalam rangka peningkatan produksi daerah industri pengolahan perlu didorong untuk terus tumbuh.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Jml industri th berjalan} - \text{Jml industri th.lalu}}{\text{Jml industri tahun lalu}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
2). Persentase Kontribusi sektor Perindustrian terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB)		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi pertumbuhan sektor industri, mengingat sektor industri memiliki kontribusi paling besar terhadap total PDRB Jawa Tengah.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah kontribusi sektor industri}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>	
3). Nilai kenaikan ekspor non migas (US \$).		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kenaikan nilai ekspor non migas, mengingat ekspor dan impor non migas sangat mempengaruhi</li> </ul>	

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			neraca perdagangan Jawa Tengah. <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi pengukuran :</b> Nilai ekspor non migas tahun berjalan - Nilai ekspor non migas tahun lalu.</li> <li>• <b>Tipe penghitungan :</b> Non Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah /BPS Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		4).Nilai Impor Non Migas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi penurunan nilai import produk konsumsi, mengingat import produk konsumsi mempengaruhi devisa neraca perdagangan dan untuk meningkatkan nilai jual produk dalam negeri.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Nilai import produk konsumsi tahun lalu - Nilai import produk konsumsi tahun bersangkutan.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Perindustrian dan Perdagangan Prov. Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah /BPS Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		5).Ekspor bersih perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi nilai ekspor perdagangan, mengingat ekspor bersih perdagangan mempengaruhi neraca perdagangan Jawa Tengah</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Nilai ekspor non migas tahun lalu - Nilai ekspor non migas tahun berjalan</li> </ul>



NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah/BPS Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		6). Persentase kontribusi ekspor bersih perdagangan terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk memantau seberapa banyak kontribusi ekspor bersih perdagangan di Jawa Tengah terhadap PDRB, mengingat dalam rangka peningkatan produksi daerah, perdagangan perlu didorong untuk berkembang khususnya ke pasar luar negeri .</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah kontribusi ekspor bersih perdagangan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah /BPS Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
<b>2.7</b>	<b>Meningkatnya Iklim dan Pengembangan Investasi</b>		
2.7.1	Meningkatnya realisasi investasi	1). Jumlah Investor/Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA);	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa banyak perusahaan (PMA/PMDN) yang berinvestasi di Jawa Tengah, disamping itu juga untuk mengetahui nilai investasi di Jawa Tengah, mengingat investasi merupakan salah satu unsur penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran:</b> Jumlah Investor/Perusahaan PMDN dan PMA pada tahun berjalan</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan:</b> Komulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		2). Nilai Investasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Indikator ini dipilih untuk mengetahui seberapa besar nilai investasi di Jawa Tengah, mengingat nilai investasi berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran:</b> Jumlah nilai investasi pada tahun bersangkutan</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan:</b> Non Komulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data:</b> Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
<b>2.8</b>	<b>Mewujudkan pembangunan yang berkeadilan</b>		
2.8.1	Meningkatnya keadilan gender dan perlindungan anak	1). Indeks Pembangunan Gender (IPG)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengukur kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, mengingat IPG Jawa Tengah masih perlu ditingkatkan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> IPG diukur dengan cara membandingkan Angka Harapan Hidup, Angka Melek Huruf, rata-rata Lama Sekolah dan rata-rata pendapatan antara laki-laki dan perempuan</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Badan Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> BPS Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		2). Rasio kab./kota menuju Kota Layak Anak (KLA)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Indikator ini dipilih sebagai Implementasi pemenuhan hak anak berdasarkan Peraturan Menteri PPPA No. 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan KLA yang menunjukkan komitmen Pemda dan <i>stakeholder</i> untuk memenuhi hak anak dan membangun lingkungan yang layak bagi anak.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran:</b> Jumlah kab./kota yang sudah <i>launching</i> /deklarasi menuju KLA dibanding 35 Kab/Kota</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan:</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Badan Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data:</b> Badan Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		3). Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini merupakan salah satu indikator penting untuk mengukur keberdayaan perempuan yang dapat menyumbang peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jmlh pekerja perempuan di lembaga pemerintah}}{\text{Jmlh pekerja perempuan}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Badan Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah/BPS Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		4). Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini merupakan indikator untuk mengetahui upah minimum dan meningkatkan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi di lembaga swasta .</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jml pekerja perempuan di lembaga swasta}}{\text{Jml pekerja perempuan}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Badan Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> BPS Provinsi Jawa Tengah / Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
2.8.2	Meningkatnya kualitas hidup serta perlindungan terhadap perempuan anak termasuk anak berkebutuhan khusus	1). Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengukur keberdayaan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan sumbangan pendapatan, mengingat IDG Jawa Tengah masih perlu di tingkatkan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Menjumlahkan Indeks Keterwakilan perempuan dalam Parlemen, Indeks Pengambilan Keputusan dan Indeks Distribusi Pendapatan dibagi tiga .</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Badan Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> BPS Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>
		2). Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Perempuan dan Anak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Indikator ini merupakan indikator penting guna meningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran:</b> <math>\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Badan Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Badan Pemberdayaan Perempuan, Pelindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
2.8.3	Meningkatnya ketersediaan keterjangkauan dan kesetaraan dalam penyelenggaraan pendidikan	1). Angka Putus Sekolah (APS) pada jenjang : - SD/MI; - SMP/MTs; - SMA/MA/SMK .	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Jawa Tengah sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatan akses layanan pendidikan jenjang SD/ SDLB/ MI.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math>\frac{\text{Siswa putus sekolah sesuai jenjang pendikannya}}{\text{Jml siswa Jateng sesuai jenjang pendidikan}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		2). Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Jawa Tengah sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatan akses layanan Pendidikan Khusus dan layanan Khusus</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math>\frac{\text{Siswa Sekolah Luar Biasa}}{\text{Jml anak berkebutuhan khusus di Jawa Tengah}} \times 100 \%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
2.8.4	Meningkatnya kualitas dan ketrampilan masyarakat	1). Jumlah desa vokasi yang dikembangkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan masyarakat di Jawa Tengah sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatan desa vokasi yang dikembangkan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah desa vokasi yang dikembangkan pada tahun bersangkutan</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
		2). Jumlah pelaku/kelompok masyarakat yang terfasilitasi pendidikan kemasyarakatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan kemasyarakatan di Jawa Tengah sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatan masyarakat yang mendapatkan fasilitasi pendidikan kemasyarakatan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan fasilitasi pendidikan kemasyarakatan pada tahun bersangkutan.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		3). Jumlah kewirausahaan pemuda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran program pembangunan kepemudaan di Jawa Tengah sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peminatan pemuda dalam bidang kewirausahaan .</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah pemuda yang menjadi wirausaha pada tahun bersangkutan</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
2.9	Peningkatan pencegahan permasalahan sosial dan pemerataan akses pelayanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).		

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
2.9.1	Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berspektif Hak Asasi Manusia (HAM)	1). Persentase penanganan PMKS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini untuk mengetahui jumlah PMKS di Jawa Tengah yang tertangani pada tahun bersangkutan, mengingat di Jawa Tengah masih banyak PMKS yang perlu mendapatkan penanganan sosial.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah PMKS ditangani}}{\text{Jumlah total PMKS}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah/BPS Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		2). Persentase penguatan kapasitas Prasarana dan Sarana Kesejahteraan Sosial (PSKS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah PSKS di Jawa Tengah yang mendapatkan penanganan dan penguatan kapasitas dalam penanganan PMKS, mengingat di Jawa Tengah masih cukup banyak PSKS yang perlu mendapatkan penguatan kapasitas.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah PSKS yg ditingkatkan kapasitasnya}}{\text{Jumlah PSKS}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah/BPS Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
3.1	<b>Menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang kompeten, profesional, berdedikasi tinggi dan berorientasi pada pelayanan prima</b>		
3.1.1	Meningkatnya kinerja tatakelola pemerintahan provinsi	1). Indonesia Governance Indeks (IGI)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengetahui angka IGI di Jawa Tengah, karena IGI akan menunjukkan baik tidaknya tata</li> </ul>



NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>kelola sebuah pemerintahan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> IGI diukur berdasarkan indeks atas indikator tata pemerintahan yang baik yang meliputi: transparansi, partisipasi, ketaatan pada hukum dan akuntabilitas, dengan rating antara 0 sampai dengan 10 .</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Biro Organisasi dan Kepegawaian Setda Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> BPS Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
3.1.2	Meningkatnya profesionalisme dan kompetensi aparatur serta sistem pola karier yang jelas	Promosi Jabatan struktural secara terbuka	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan sistem pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan struktural secara terbuka di Pemerintah Prov. Jawa Tengah</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Kondisi pelaksanaan promosi jabatan struktural secara terbuka di Pemerintah Prov.Jawa Tengah pada tahun bersangkutan .</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan:</b> Non Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
3.1.4	Terwujudnya kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengetahui kemajuan mengenai pelayanan perijinan dan non perijinan yang telah diselenggarakan oleh PTSP, hal ini penting untuk mendorong agar semua jenis perijinan yang semula diselenggarakan di SKPD secara bertahap semua dilayani di PTSP .</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan PTSP}}{\text{Jumlah perijinan dan non perijinan}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b>            Kumulatif         </li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b>            Biro Organisasi dan Kepegawaian Setda Provinsi Jawa Tengah         </li> <li>• <b>Sumber Data :</b>            Biro Organisasi dan Kepegawaian Setda Provinsi Jawa Tengah         </li> </ul>
3.1.5	Terwujudnya tertib administrasi	1). Rasio penduduk memiliki e-KTP per wajib e-KTP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>            Indikator ini dipilih untuk mengetahui dan mengevaluasi Rasio penduduk memiliki e-KTP per wajib KTP, Indikator ini dibutuhkan untuk mendorong agar seluruh penduduk telah wajib KTP memiliki e-KTP.         </li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jml penduduk } \geq 17 \text{ th yg ber e-KTI}}{\text{Jml penduduk wajib ber e-KTP}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b>            Kumulatif         </li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b>            Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah         </li> <li>• <b>Sumber Data :</b>            Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah         </li> </ul>
		2). Persentase penduduk 0-18 Tahun memiliki akte kelahiran	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>            Indikator ini dipilih untuk mengetahui dan mengevaluasi prosentase penduduk 0-18 Tahun memiliki Akta kelahiran, Indikator ini dibutuhkan untuk mengendalikan agar setiap penduduk memiliki akta kelahiran.         </li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jml penddk 0-18th berakte kelahiran}}{\text{Jml penduduk 0-18 th}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b>            Kumulatif         </li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b>            Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan         </li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			Kependudukan Provinsi Jawa Tengah <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		3). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk melihat seberapa besar peningkatan PAD Provinsi Jawa Tengah per tahunnya, hal ini penting dilakukan karena PAD merupakan sumber pendanaan pelaksanaan pemerintahan, pemba-ngunan dan pelayanan masyarakat.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Realisasi PAD tahun berjalan - Realisasi PAD tahun sebelumnya</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		4). Persentase Aset yang dikelola dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk melihat presentase aset yang dikelola dengan baik, mengingat sampai saat ini pengelolaan aset Pemerintah Prov.Jawa Tengah masih perlu dioptimalkan</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math>\frac{\text{Jml Aset yang dikeloa dengan baik}}{\text{Jml aset milik Pem.Prov.Jateng}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
<b>3.2</b>	<b>Menciptakan sistem birokrasi yang transparan dan akuntabel</b>		
3.2.1	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang	Implementasi aksi Pencegahan dan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengeta-hui <i>progres</i> aksi pencegahan dan pem-</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
	bebas korupsi, kolusi dan nepotisme	Pemberantasan Koprupsi (PPK)	<p>berantasan korupsi di Jawa Tengah, mengingat korupsi masih menjadi masalah penyelenggaraan pemerintahan yang perlu diminimalisir.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <i>Progres</i> pelaksanaan aksi PPK di Pemerintah Provinsi dan kabupaten /kota di Jawa Tengah</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
3.2.2	Tercapainya Laporan Keuangan Daerah dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	Opini BPK atas laporan keuangan daerah Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi mengenai kondisi laporan keuangan daerah, hal ini penting dalam rangka mendorong terjadinya tertib manajemen dan administrasi pengelolaan keuangan daerah.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Opini BPK atas Laporan Keuangan Daerah pada tahun bersangkutan</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Biro Keuangan Setda dan Inspektorat Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah</li> </ul>
3.2.3	Terwujudnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1). Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kemajuan pelaksanaan SPIP di SKPD Prov.Jawa Tengah, hal ini dipandang penting dalam rangka mendorong terwujudnya <i>Good Governance dan Clean Government</i>".</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah SKPD yang mengimplementasikan SPIP pada tahun bersangkutan .</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Inspektorat Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Inspektorat Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
<b>3.3</b>	<b>Pelaksanaan penegakkan hukum</b>		
3.3.1	Terwujudnya penegakkan dan harmonisasi produk hukum yang mendorong pencapaian akuntabilitas dan kondusivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan	1). Jumlah peraturan perundang-undangan yang disusun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi jumlah peraturan perundang-undangan yang disusun, hal ini dianggap penting untuk mendorong terjadinya kepastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan, mengingat masih banyak aspek pemerintahan dan pembangunan belum dilakukan pengaturan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah peraturan perundang-undangan yang disusun pada tahun bersangkutan.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		2). Persentase penindakan pelanggaran Perda	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah pencapaian sasaran penegakan produk hukum daerah telah sesuai target dalam penindakan pelanggarannya, hal ini dianggap penting untuk menciptakan kepatuhan masyarakat, aparatur dan Badan Usaha terhadap produk hukum daerah.</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jml pelanggaran produk hukum daerah yang ditindak}}{\text{Jml pelanggaran produk hukum daerah yang ditemukan}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Satpol PP Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Satpol PP Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
<b>4.1</b>	<b>Menurunkan potensi konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama</b>		
4.1.1	Tertanganinya kejadian konflik antar kelompok masyarakat, suku dan agama	1). Persentase penanganan konflik sosial	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk memantau dan mengevaluasi penurunan jumlah konflik sosial di masyarakat mengingat potensi terjadi konflik sosial di masyarakat masih dimungkinkan terjadi.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah konflik sosial di masyarakat yang tertangani}}{\text{Jumlah konflik sosial masyarakat}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>
<b>4.2</b>	<b>Memperkuat Pancasila sebagai dasar negara dan 3 pilar kebangsaan dalam budaya dan jati diri masyarakat</b>		
4.2.1	Meningkatnya kelembagaan sosial masyarakat dalam menumbuhkan rasa bangga terhadap budaya dan jati diri bangsa	1). Rasio jumlah Rakyat Terlatih (Ratih) / Perlindungan Masyarakat (Linmas) dengan Penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi rasio antara Ratih/Linmas dengan jumlah penduduk, mengingat Ratih/Linmas merupakan lembaga sosial masyarakat sebagai sarana untuk menumbuhkembangkan rasa bangga terhadap budaya dan jati diri bangsa.</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Ratih/Linmas}}{\text{Jumlah Masyarakat}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>
4.2.2	Menguatnya semangat kebangsaan, persatuan dan jiwa patriotik	1). Persentase ketersediaan komponen pendukung dan cadangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam kewaspadaan dini dalam rangka mewujudkan situasi kondusif.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah masyarakat yang mengikuti diklat kewaspadaan dini}}{\text{Jumlah total masyarakat}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah .</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Prov.Jawa Tengah.</li> </ul>
<b>4.3</b>	<b>Meningkatkan partisipasi politik masyarakat</b>		
4.3.1	Meningkatnya partisipasi politik masyarakat	Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat kemajuan dalam kehidupan dan sistem demokrasi .</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> IDI diukur dari tiga aspek yaitu : Kebebasan Sipil (<i>Civil Liberties</i>), Hak-Hak Politik (<i>Political Rights</i>), dan Lembaga Demokrasi (<i>Institutions of Democracy</i>).</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>
4.3.2	Meningkatnya peran Parpol dan Ormas dalam proses demokrasi	Persentase pemilih dalam menggunakan hak pilih, Pemilu : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pilgub;</li> <li>- Pil Pres;</li> <li>- Pileg;</li> <li>- Pilkada kab./kota .</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilu dan pemilihan, hal ini penting guna mendorong peningkatan kehidupan demokrasi di masyarakat.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah masyarakat yg mempunyai hak pilih dan menggunakan hak pilihnya}}{\text{Jumlah masyarakat yg memiliki hak pilih}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>
4.3.3	Meningkatnya keterwakilan perempuan dalam politik	Persentase keterwakilan perempuan dalam parlemen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengetahui tingkat partisipasi perempuan dalam bidang politik, mengingat sampai saat ini keterwakilan perempuan di legislatif masih perlu ditingkatkan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah anggota legislatif perempuan}}{\text{Jumlah anggota legislatif}} \times 100\%</math> </li> </ul>



NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>
4.4	<b>Mewujudkan Budaya Jawa Tengah yang semakin berkembang pada semua aspek kehidupan</b>		
4.4.1	Meningkatnya pemahaman masyarakat atas budaya jawa	1). Persentase penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesenian (gelar seni) Sarana Kesenian, Penyelenggaraan Misi Kesenian	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengukur tingkat pencapaian penerapan indikator SPM Kesenian</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Jmlh Indikator SPM kesenian yg dilaksanakan}}{\text{Indikator seluruh SPM kesenian}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Kumulatif.</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		2). Persentase benda situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk menilai peran serta upaya pemerintah daerah dalam melestarikan cagar budaya</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Jmlh benda situs dan kawasan cagar budaya yg dilestarikan}}{\text{Jumlah benda situs dan kawasan cagar budaya}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
4.4.2	Meningkatnya sikap dan perilaku masyarakat yang dijiwai oleh keluhuran budaya Jawa	1). Prosentase dan jumlah lokasi pelestarian cagar budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk menilai peran serta upaya pemerintah daerah dalam melestarikan cagar budaya.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Jml lokasi cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>
		2). Jumlah kunjungan wisata : - Wisatawan Nusantara - Wisatawan Mancanegara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk menilai peran serta pemerintah dalam upaya meningkatkan jumlah wisatawan baik wisatawan nusantara maupun mancanegara yang berkunjung ke daya tarik wisata</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah wisatawan Nusantara dan wisatawan Mancanegara yang berkunjung ke daya tarik wisata, wisata minat khusus, event dan lain-lain pada tahun bersangkutan.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah .</li> </ul>
		3). Kontribusi sektor pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDRB)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mengukur peran serta pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor pariwisata dalam meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB)</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah kontribusi sektor pariwisata}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b>            Kumulatif         </li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b>            Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah         </li> <li>• <b>Sumber Data :</b>            BPS Provinsi Jawa Tengah         </li> </ul>
4.4.3	Meningkatnya pelaksanaan tradisi budaya jawa dalam kehidupan masyarakat	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>            Untuk mengukur peran serta pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan gelar seni berupa pagelaran, pameran, dan lomba seni.         </li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>            Jumlah gelar seni dan budaya pada tahun bersangkutan         </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b>            Non Kumulatif         </li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b>            Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah         </li> <li>• <b>Sumber Data :</b>            Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.         </li> </ul>
5.1	<b>Meningkatkan peran masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan</b>		
5.1.1	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan	1). Persentase pelaksanaan rebug masyarakat dalam pengambilan keputusan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>            Indikator ini dipilih untuk mengakomodir aspirasi dan usulan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.         </li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jml pelaksanaan rebug masyarakat}}{\text{Jml perencanaan rebug}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b>            Non Kumulatif         </li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b>            Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah.         </li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sumber Data :</b> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		2). Rasio forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Indikator ini dipilih sebagai Implementasi pemenuhan hak anak berdasarkan Peraturan Menteri PPPA No.11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kota Layak Anak (KLA) yang menunjukkan komitmen Pemda dan stakeholder untuk memenuhi hak anak dan membangun lingkungan yang layak bagi anak.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran:</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah kab./kota yang sudah launching/deklarasi menuju KLA}}{\text{Jumlah Kab/Kota di Jawa Tengah}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan:</b> Komulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data:</b> Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
5.2	<b>Meningkatkan kesesuaian program pembangunan dengan kebutuhan dan permasalahan yang dialami masyarakat</b>		
5.2.1	Berkurangnya kesenjangan pembangunan antar wilayah	Indeks wiliamson	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengukur kesenjangan pendapatan antar wilayah (Kabupaten/ Kota), mengingat sampai saat ini masih terjadi kesenjangan pendapatan antar kab/kota di Jawa Tengah.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">iw = \frac{\sqrt{(Y_i - Y)^2}}{Y}</math>   <math display="block">Y_i = \text{PDRB perkapita di kab/kota } i</math>   <math display="block">Y = \text{PDRB perkapita rata-rata provinsi}</math> </li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>fi = jumlah penduduk di kab/kota i n = jumlah penduduk di provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipe Perhitungan:</b> Komulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Badan Koordinasi Wilayah Provinsi Jawa Tengah I, II dan III</li> <li>• <b>Sumber Data:</b> BPS Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
5.2.2	Meningkatnya ketetapan waktu dan mutu pelaksanaan pembangunan daerah	<p>1). Dokumen perencanaan pembangunan yang ditetapkan tepat waktu</p> <p>2). Evaluasi dokumen perencanaan daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih karena meng-evaluasi ketepatan waktu perencanaan, mengingat ketepatan waktu perencanaan akan berpengaruh pada proses penganggaran.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dihasilkan tepat waktu (RKPD/RPJMD).</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Komulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan pembangunan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan tahunan (RKPD) serta menengah (RPJMD) .</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Komulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sumber Data :</b> Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		3). Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ,dan inovasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Indikator ini dipilih untuk mengetahui jumlah penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Jawa Tengah pada tahun bersangkutan mengingat Iptek dan inovasi daerah memberikan kontribusi bagi kemajuan pemerintah daerah.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran:</b> Jumlah penguatan Desa/Kelurahan Inovasi, Kabupaten/Kota inovatif, Klaster UMKM berbasis teknologi.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif.</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data:</b> Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Tengah.</li> </ul>
<b>6.1</b>	<b>Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat</b>		
6.1.1	Menurunnya angka kematian dan angka kesakitan	1). Angka kematian Ibu (AKI)/100.000 Kelahiran Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan program pelayanan kesehatan ibu yang sedang dilaksanakan, dapat memberikan pengaruh pada peningkatan status kesehatan ibu terutama ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas, mengingat setiap kehamilan beresiko dan pembangunan kesehatan di Jawa Tengah prioritasnya diarahkan pada peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita .</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Jumlah Kematian ibu}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 100.000</math> dlm satu tahun</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		2). Angka kematian Bayi (AKB) /1.000 Kelahiran Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini untuk mengevaluasi pelaksanaan program pelayanan kesehatan bayi yang sedang dilaksanakan memberikan pengaruh pada peningkatan kesehatan bayi yang merupakan usia rentan terhadap permasalahan kesehatan, mengingat pembangunan kesehatan di Jawa Tengah prioritasnya diarahkan pada kesehatan ibu, bayi, balita.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math>\frac{\text{Jumlah Kematian Bayi}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 1.000</math> dlm satu tahun</li> <li>• <b>Tipe Penghitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		3). Angka Kematian Balita (AKABA)/1000 Kelahiran Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan program pelayanan kesehatan balita yang sedang dilaksanakan memberikan pengaruh pada peningkatan kesehatan balita yang merupakan usia rentan terhadap permasalahan kesehatan, mengingat pembangunan kesehatan di Jawa Tengah prioritasnya diarahkan pada peningkatan kesehatan ibu, bayi, balita dan keluarga berencana.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math>\frac{\text{Jumlah Kematian Balita}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup dalam satu tahun}} \times 1.000</math></li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		4). Angka Kematian Demam Berdarah (DBD)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator:</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi angka kematian yang disebabkan oleh DBD, khususnya yang ditangani oleh fasilitas pelayanan kesehatan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Jml kematian kasus DBD}}{\text{Jml kasus DBD ditemukan}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Non Komulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber data :</b> Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		5). Angka Kesakitan Demam Berdarah (DBD)/ 100.000 penduduk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Untuk mendapatkan gambaran situasi penyakit DBD di masyarakat yang ditangani oleh fasyankes .</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Jml kasus DBD yg ditemukan}}{\text{Jml Penduduk}} \times 100.000</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan:</b> Non Komulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber data :</b> Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		6). Prevalensi Gizi Buruk	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator prevalensi gizi buruk pada balita merupakan <i>output</i> utama dari</li> </ul>



NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>upaya intervensi asupan gizi dan pola asuh gizi keluarga. Dalam indikator ini tercakup aspek kecukupan gizi makro (kalori dan protein) sekaligus aspek kecukupan gizi mikro (vitamin dan mineral) sebagai nutrisi pendukung pertumbuhan. Indikator ini dianggap penting untuk mengevaluasi dan mengantisipasi terjadinya kasus gizi buruk pada balita di masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Kasus lama} + \text{kasus baru}}{\text{Jumlah balita yang diamati (ditimbang = D)}} \times 100 \%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b>            Kumulatif         </li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b>            Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah         </li> <li>• <b>Sumber Data :</b>            Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah         </li> </ul>
		7). Angka Penemuan Kasus Baru TB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>            Indikator ini dipilih untuk mendapatkan gambaran situasi penyakit TB di masyarakat, khususnya yang ditangani oleh fasilitas pelayanan kesehatan         </li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah kasus baru TB yang tercatat di fasyankes}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b>            Kumulatif         </li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b>            Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah         </li> <li>• <b>Sumber data :</b>            Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah         </li> </ul>
		8). Angka Penemuan Kasus Baru HIV/Aids	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>            Indikator ini dipilih untuk untuk mendapatkan gambaran keadaan sebenarnya tentang kasus HIV-AIDS di masyarakat, mengingat         </li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>HIV-AIDS masih merupakan ancaman penyakit yang perlu mendapatkan perhatian.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah kasus kumulatif}}{\text{Estimasi ODHA (47.514 kasus)}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber data :</b> Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		9). Angka Penemuan Kasus Baru Kusta	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi terjadinya penemuan kasus baru kusta, mengingat penyakit kusta menimbulkan tingkat kecacatan yang cukup serius dan stigma buruk di masyarakat, sehingga diperlukan gambaran tentang besarnya kasus kusta yang ada di masyarakat.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah kasus baru kusta ditemukan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		10). Angka Penemuan Kasus Diare Balita	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi terjadinya kasus diare pada Balita, mengingat berdasarkan hasil survei nasional menunjukkan bahwa angka kematian balita karena diare menduduki nomor 1 (satu) tertinggi .</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah kasus diare balita ditemukan di Puskesmas}}{\text{Target}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b>            Kumulatif         </li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b>            Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah         </li> <li>• <b>Sumber Data :</b>            Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah         </li> </ul>
		11). Angka Penemuan Kasus Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA) Balita	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>            Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi terjadinya kasus ISPA pada balita, mengingat berdasarkan hasil survei nasional menunjukkan bahwa angka kematian balita karena <i>pneumonia</i> (ISPA) menduduki nomor 2 tertinggi .         </li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah kasus pneumoni balita ditemukan di Puskesmas}}{\text{Target}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b>            Kumulatif         </li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b>            Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah         </li> <li>• <b>Sumber Data :</b>            Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah         </li> </ul>
		12). Angka Kesakitan Malaria	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>            Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi terjadinya kasus kesakitan malaria pada masyarakat khususnya yang ditangani oleh fasilitas pelayanan kesehatan, mengingat penyakit malaria masih dianggap penyakit yang menjadi penyebab kematian terbanyak.         </li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah kasus malaria yang ditemukan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1.000</math> </li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
6.2	<b>Meningkatnya ketersediaan, kesempatan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan, dan kepastian penyelenggaraan pendidikan</b>		
6.2.1	Meningkatnya kesempatan masyarakat mengenyam pendidikan	1). Angka melek huruf	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Angka Melek Huruf (AMH) adalah persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari, indikator ini digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat Sekolah Dasar.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jml penduduk Jateng Usia 15 thn ke atas yang bisa baca tulis}}{\text{Jml Penduduk Jateng usia 15 thn ke atas}} \times 100 \%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
2). Rata-rata lama sekolah		<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk melihat kualitas penduduk dalam mengenyam pendidikan formal, semakin tinggi lama sekolah semakin tinggi pendidikan yang ditamatkan .</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah tahun belajar penduduk</li> </ul>	

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam Pendidikan Formal (tidak termasuk tahun yang mengulang).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		<p>3). Angka Partisipasi Kasar (APK), jenjang pendidikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PAUD Usia 4-6 Th</li> <li>- PAUD Usia 0-5 Th</li> <li>- SD/SDLB/MI/ Paket A</li> <li>- SMP/ SMPLB /MTs/ Paket B</li> <li>- APK SMA/SMA LB/MA/Paket C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Jawa Tengah sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatan akses pendidikan sesuai dengan jenjangnya.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math>\frac{\text{Jml Siswa sesuai Jenjang Pendidikan}}{\text{Jml Penduduk Jateng Usia sekolah Sesuai jenjang pendidikan}} \times 100 \%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		<p>4). Angka Partisipasi Murni (APM), jenjang pendidikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SD/MI/Pkt A</li> <li>- SMP/ SMP LB/MTs / Pkt B</li> <li>- SMA/SMA LB/MA/Pkt C</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Jawa Tengah sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatan akses layanan sesuai jenjang pendidikan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math>\frac{\text{Jml Siswa sesuai jenjang pendidikannya}}{\text{Jml penduduk Jateng usia sekolah sesuai jenjang pendidikannya}} \times 100 \%</math></li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
6.2.2	Meningkatnya kualitas pendidikan	<p>1). Angka kelulusan, sesuai jenjang pendidikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SD/SDLB/MI</li> <li>- SMP/ SMPLB /MTs</li> <li>- SMA/SMALB / MA/ SMK</li> </ul> <p>2). Nilai rata-rata Ujian Nasional (UN), sesuai jenjang pendidikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SD/SDLB /MI /Paket A</li> <li>- UN SMP/ SMPLB /MTs</li> <li>- SMA/SMK/ MA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Jawa Tengah sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada penjaminan mutu layanan sesuai jenjang pendidikan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jml siswa lulus sesuai jenjangnya}}{\text{Jml peserta ujian sesuai jenjang pendidikan}} \times 100 \%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Komulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Jawa Tengah sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada penjaminan mutu layanan Pendidikan Dasar di Jawa Tengah.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jml Nilai UN siswa sesuai jenjangnya}}{\text{Jml Mapel UN sesuai jenjang pendidikan}}</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan:</b> Komulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		<p>3). Persentase ruang kelas sesuai Standar Nasional Pendidikan, sesuai jenjang pendidikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- SD/SDLB/MI</li> <li>- SMP/ SMPLB /MTs</li> <li>- SMA/SMK/ SMALB/ MA</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Jawa Tengah sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatan mutu sarana prasarana SD/MI di Jawa Tengah</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jml ruang kelas sesuai SNP sesuai <math>\frac{\text{jenjang pendidikannya}}{\text{Jml ruang kelas sesuai jenjang pendidikan}} \times 100 \%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		<p>4). Persentase SD/SDLB/MI yang terakreditasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Jawa Tengah sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatan mutu SD/SDLB/MI di Jawa Tengah.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math>\frac{\text{Jml lembaga SD/MI yg diakreditasi}}{\text{Jml lembaga SD/MI di Jateng}} \times 100 \%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
		5). Persentase lembaga pendidikan yang terakreditasi, sesuai jenjang pendidikan : - SMP/ SMPLB /MTs - SMA/SMK/ SMALB/ MA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Jawa Tengah sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatan mutu SMP/SMPLB /MTs di Jawa Tengah.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Jml lembaga pendidikan yang terakreditasi sesuai jenjang pendidikannya}}{\text{Jml lembaga pendidikan di Jateng sesuai jenjangnya}} \times 100 \%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		6). Pesentase Pendidik berkualifikasi S1/D4	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah capaian sasaran pembangunan pendidikan di Jawa Tengah sesuai dengan target yang telah ditentukan, khususnya pada peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan di Jawa Tengah.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math display="block">\frac{\text{Pendidik SD- SLTA berkualifikasi S1/D4}}{\text{Jml pendidik SD - SLTA di Jawa Tengah}} \times 100 \%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
<b>6.3</b>	<b>Meningkatkan Budaya Baca Masyarakat</b>		
6.3.1	Meningkatnya budaya baca masyarakat	1). Jumlah pengunjung perpustakaan provinsi per tahun	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk memantau perkembangan jumlah pengunjung/</li> </ul>



NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>pemustaka di Perpustakaan Daerah Prov.Jawa Tengah dalam satu tahun, hal ini dianggap penting untuk melihat peningkatan daya baca masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah pengunjung/pemustaka Perpustakaan Daerah Jawa Tengah pada tahun bersangkutan.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		2). Jumlah perpustakaan desa yang memenuhi standar perpustakaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk memantau jumlah desa yang memiliki perpustakaan sesuai dengan standar perpustakaan, mengingat belum semua perpustakaan desa memenuhi standar.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah perpustakaan desa yang sesuai dengan standar di Jawa Tengah.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Badan Arsip dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
<b>6.4</b>	<b>Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman</b>		
6.4.1	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum, sanitasi, perumahan layak huni	1). Persentase cakupan layanan air minum perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar pelaksanaan pembangunan pada pemenuhan cakupan layanan air minum di daerah perkotaan, mengingat layanan air minum perkotaan masih perlu</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<p>ditingkatkan .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jml Penduduk Perkotaan yang terlayani Air Minum}}{\text{Jumlah Penduduk Perkotaan di Jateng}} \times 100 \%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b>            Kumulatif         </li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b>            Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah .         </li> <li>• <b>Sumber Data :</b>            Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.         </li> </ul>
		2). Persentase cakupan layanan air minum perdesaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>            Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar pelaksanaan pembangunan pada pemenuhan cakupan layanan air minum dan sanitasi di daerah perdesaan, mengingat layanan air minum perdesaan masih perlu ditingkatkan.         </li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jml penduduk perdesaan yang terlayani air minum}}{\text{Jumlah penduduk perdesaan}} \times 100 \%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b>            Kumulatif         </li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b>            Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.         </li> <li>• <b>Sumber Data :</b>            Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.         </li> </ul>
		3). Persentase cakupan layanan sanitasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>            Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar pelaksanaan pembangunan pada pemenuhan cakupan sanitasi di Prov.Jawa Tengah, mengingat masih cukup banyak masyarakat yang belum mendapatkan pelayanan sanitasi secara baik.         </li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah Penduduk yg terlayani Sanitasi}}{\text{Jumlah Penduduk Jawa Tengah}} \times 100 \%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b>            Kumulatif         </li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b>            Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah         </li> <li>• <b>Sumber Data :</b>            Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah         </li> </ul>
		4). Rasio rumah layak huni	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>            Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar rasio rumah layak huni di Prov.Jawa Tengah, mengingat jumlah rumah tidak layak huni masih cukup banyak sehingga perlu bantuan untuk direnovasi.         </li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jml Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah total rumah}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b>            Kumulatif.         </li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b>            Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah         </li> <li>• <b>Sumber Data :</b>            Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah         </li> </ul>
<b>6.5</b>	<b>Meningkatkan penanganan infrastruktur pertanian dalam arti luas</b>		
6.5.1	Meningkatnya kinerja layanan jaringan irigasi dan ketersediaan air baku serta partisipasi masyarakat	1). Persentase jaringan irigasi baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>            Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan jaringan irigasi berpengaruh pada peningkatan kondisi baik jaringan irigasi kewenangan Prov.Jawa Tengah, mengingat masih cukup banyak jaringan irigasi yang perlu diperbaiki.         </li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jml daerah irigasi kondisi baik} + \text{rusak ringan}}{\text{Jml daerah irigasi kewenangan provinsi}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b>            Kumulatif         </li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b>            Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah         </li> <li>• <b>Sumber Data :</b>            Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah         </li> </ul>
		2). Persentase pemenuhan kebutuhan air baku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>            Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan sarpras air baku memberikan pengaruh pada peningkatan pemenuhan kebutuhan air baku, mengingat kebutuhan air baku sampai saat ini belum dapat dipenuhi secara baik.         </li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Ketersediaan Air Baku}}{\text{Kebutuhan Air Baku}} \times 100 \%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b>            Kumulatif         </li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b>            Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah         </li> <li>• <b>Sumber Data :</b>            Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah         </li> </ul>
<b>7.1</b>	<b>Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi</b>		
7.1.1	Meningkatnya kinerja penanganan jalan dan jembatan	1). Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>            Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar proporsi kondisi permukaan jalan dalam kondisi baik, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dibidang kebinamargaan, mengingat jalan dalam kondisi baik di Jawa Tengah masih perlu terus ditingkatkan untuk menunjang kelancaran arus transportasi dan distribusi barang.         </li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik}}{\text{Panjang jalan}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b>            Kumulatif         </li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b>            Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah         </li> <li>• <b>Sumber Data :</b>            Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah         </li> </ul>
		2). Persentase panjang jalan dengan lebar >6,00 m	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>            Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar proporsi jalan provinsi dengan lebar sesuai dengan standarisasi jalan provinsi, mengingat masih banyak jalan provinsi yang perlu ditingkatkan lebar jalannya .         </li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Panjang jalan provinsi dengan lebar sesuai standar}}{\text{Panjang jalan}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b>            Kumulatif         </li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b>            Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah.         </li> <li>• <b>Sumber Data :</b>            Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah         </li> </ul>
		3). Persentase panjang jalan provinsi sebagai jalan kolektor (MST >8 Ton)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan indikator :</b>            Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar proporsi jalan provinsi sesuai dengan kelas jalan, mengingat masih banyak jalan provinsi yang perlu sebagai jalan kolektor (MST &gt; 8 Ton).         </li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Panjang jalan sesuai dengan kelas jalan}}{\text{Panjang jalan}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b>            Kumulatif         </li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		4). Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa besar proporsi kondisi jembatan dalam kondisi baik, sehingga dapat digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan dibidang kebinamargaan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math>\frac{\text{Panjang Jembatan dalam kondisi baik}}{\text{Panjang jembatan}} \times 100 \%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
7.1.2	Meningkatnya ketersediaan dan kondisi moda serta keselamatan transportasi	1). Jumlah kab./kota yang melakukan pengembangan angkutan umum dan masal di Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih dalam upaya mengembangkan pelayanan angkutan umum/massal, konektifitas dan jaringan trayek sehingga meningkatkan produktifitas kinerja operasional transportasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah kab/kota yang mengembangkan angkutan massal tahun sebelumnya - Jumlah kab/kota yang mengembangkan angkutan massal tahun bersangkutan.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		2). Jumlah desa yang melakukan pengembangan angkutan pedesaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih dalam upaya mengembangkan pelayanan angkutan pedesaan sehingga meningkatkan pelayanan transportasi di pedesaan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah desa yang melakukan pengembangan angkutan pedesaan tahun sebelumnya - Jumlah desa yang melakukan pengembangan angkutan pedesaan tahun bersangkutan.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		3). Persentase ketersediaan prasarana keselamatan jalan provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih dalam upaya meningkatkan sarana, prasarana dan perlengkapan keselamatan transportasi</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Persentase terpasang prasarana keselamatan jalan provinsi tahun sebelumnya - Persentase terpasang prasarana keselamatan jalan provinsi tahun bersangkutan .</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
		4). Lokasi ketersediaan prasarana keselamatan perlintasan kereta api di jalan provinsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih dalam upaya menurunkan angka kecelakaan lalu lintas pada perlintasan sebidang antara jalan raya dengan jalan Kereta Api (KA)</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Lokasi peningkatan, pemeliharaan prasarana keselamatan perlintasan KA di jalan provinsi tahun sebelumnya - Lokasi peningkatan, pemeliharaan prasarana keselamatan perlintasan KA di jalan provinsi tahun bersangkutan.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
7.1.3	Meningkatnya penanganan banjir dan rob serta pantai kritis	Persentase penurunan luasan daerah genangan akibat banjir	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Pantai yang dilakukan berpengaruh pada penurunan luas daerah genangan banjir.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Luas genangan banjir tahun lalu - Luas genangan banjir tahun bersangkutan</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Pengolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Pengolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
7.1.4	Meningkatnya kondisi dan ketersediaan infrastruktur dan	Persentase cakupan fasilitasi pembangunan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih dalam upaya melakukan evaluasi terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur</li> </ul>



NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
	transportasi strategis dan peran serta masyarakat	strategis	<p>strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah pembangunan infrastruktur strategis yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Tahun bersangkutan.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
<b>7.2</b>	<b>Meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi</b>		
7.2.1	Meningkatnya cakupan masyarakat pengguna sarana teknologi komunikasi dan informasi	Jumlah SKPD yang mengembangkan teknologi informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih dalam upaya melakukan evaluasi terhadap pengembangan teknologi informasi di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) guna mendukung pelayanan kepada masyarakat sehingga cakupan masyarakat pengguna sarana teknologi komunikasi dan informasi menjadi meningkat.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah SKPD yang mempunyai <i>websiste</i> pada tahun bersangkutan.</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov.Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Prov.Jawa Tengah</li> </ul>
<b>7.3</b>	<b>Menerapkan konsep ramah lingkungan dalam setiap pembangunan</b>		
7.3.1	Terwujudnya pembangunan berwawasan lingkungan	1). Persentase pengaduan akibat dugaan pencemaran/ kerusakan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih dalam upaya melakukan pengendalian terhadap pencemaran/kerusakan lingkungan, hal ini penting dilakukan untuk</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
		lingkungan yang ditindaklanjuti	<p>menjaga agar setiap pengaduan akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan dapat ditindaklanjuti .</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Jumlah pengaduan akibat pencemaran lingkungan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan akibat dugaan pencemaran lingkungan}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b>            Kumulatif         </li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b>            Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah         </li> <li>• <b>Sumber Data :</b>            Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah         </li> </ul>
		2). Persentase luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Wilayah Perkotaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>            Indikator ini dipilih dalam upaya melakukan pengendalian terhadap luas RTH di wilayah Perkotaan, mengingat kondisi saat ini terjadi penurunan persentase ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan yang sebenarnya cukup penting untuk menjaga kualitas lingkungan.         </li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b>  <math display="block">\frac{\text{Luas Ruang Terbuka Hijau}}{\text{Luas Kota}} \times 100\%</math> </li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b>            Kumulatif         </li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b>            Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah         </li> <li>• <b>Sumber Data :</b>            Badan Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Tengah         </li> </ul>
		3). Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b>            Indikator ini dipilih untuk memantau hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi, guna mengendalikan luasan lahan kritis agar tidak terus bertambah.         </li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math>\frac{\text{Luas Lahan Kritis yg direhabilitasi}}{\text{Total luas lahan kritis}} \times 100 \%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Kehutanan Prov.Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Dinas Kehutanan Prov.Jawa Tengah</li> </ul>
		4). Persentase kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk memantau seberapa besar kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB Jawa Tengah pada tahun bersangkutan.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> <math>\frac{\text{Jumlah kontribusi sub sektor kehutanan}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%</math></li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> BPS Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
<b>7.4</b>	<b>Meningkatnya ketangguhan dalam penanggulangan bencana</b>		
7.4.1	Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan masyarakat dalam penanggulangan bencana	1). Jumlah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kab./kota berdasarkan Peraturan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk memantau seberapa banyak pemerintah kab./kota yang telah memiliki kelembagaan BPBD, hal ini penting untuk memperkuat penanggulangan bencana di kab./kota .</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah pemerintah kab./kota di Jawa Tengah yang telah memiliki BPBD yang dibentuk berdasarkan Perda pada tahun bersangkutan</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

NO	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan, SKPD Penanggungjawab dan Sumber Data)
(1)	(2)	(3)	(4)
			<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Sumber Data :</b> Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>
		2). Jumlah Desa Tangguh Bencana	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Alasan Pemilihan Indikator :</b> Indikator ini dipilih untuk memantaui seberapa banyak Desa tangguh bencana yang telah terbentuk di Jawa Tengah, hal ini penting untuk memperkuat partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.</li> <li>• <b>Formulasi Pengukuran :</b> Jumlah Desa tangguh bencana yang telah terbentuk pada tahun bersangkutan .</li> <li>• <b>Tipe Perhitungan :</b> Kumulatif</li> <li>• <b>SKPD Penanggungjawab :</b> Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah</li> <li>• <b>Sumber Data :</b> Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah</li> </ul>

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO